

Peran Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah

Marsa Adelia¹, Wirna Lisa², Bhayu Rhama³, Fitriana Selvia⁴, Imanuel Jaya Suhin⁵

Universitas Palangka Raya

Email: selviaf@fisip.upr.ac.id

Abstract. *This study aims to understand the effectiveness of disaster training in improving employee performance at the Disaster Management and Fire Department (BPBPK) of Central Kalimantan Province. The research employs a qualitative approach with a descriptive design to describe social realities as they are, based on the experiences, perceptions, and views of the research subjects. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving BPBPK employees and related parties. The findings show that the disaster training conducted has had a positive impact on increasing employees' knowledge, technical skills, and preparedness in responding to emergency situations. However, its effectiveness is still limited by inadequate facilities, irregular training frequency, and the lack of post-training evaluation. Therefore, improvements in training planning, implementation, and evaluation are needed to optimize its contribution to enhancing employee performance and institutional preparedness in disaster management in Central Kalimantan.*

Keywords: *Disaster Training, Effectiveness, Employee Performance, BPBPK, Central Kalimantan.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa efektif pelatihan kebencanaan dalam meningkatkan kinerja karyawan di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan menggunakan desain deskriptif, penelitian ini menggambarkan realitas sosial melalui pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kebencanaan telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesiapsiagaan pegawai dalam situasi darurat. Informasi diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari pegawai dan pihak terkait di BPBPK. Namun, keterbatasan sarana, pelatihan yang tidak rutin, dan kurangnya evaluasi pascapelatihan menghambat kinerjanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan agar dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja pegawai dan kesiapsiagaan lembaga dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah.

Kata kunci: Pelatihan Kebencanaan, Efektivitas, Kinerja Pegawai, BPBPK, Kalimantan Tengah.

Received Oct 13, 2025; Revised 03 Dec, 2025; Accepted Dec 12, 2025

* **Marsa Adelia:** Email: selviaf@fisip.upr.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam di dunia karena letaknya berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar dan termasuk dalam kawasan *Ring of Fire* atau Cincin Api Pasifik. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia kerap mengalami gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024) lebih dari dua ribu bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025, yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, infrastruktur, dan perekonomian nasional (Arifin, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa risiko bencana di Indonesia tidak hanya tinggi, tetapi juga meningkat akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan degradasi lingkungan.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap berbagai jenis bencana. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, Kalimantan Tengah memiliki sejarah kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, angin puting beliung, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan (BNBP, 2021). Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif yang terukur dan terpadu untuk mengurangi risiko dan dampak kerugian akibat bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari responsif menuju pengurangan risiko, yang berarti bahwa kesiapsiagaan harus menjadi bagian utama dalam setiap strategi mitigasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007).

Dalam konteks tersebut, peran **Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK)** Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sangat strategis. Lembaga ini merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat di tingkat daerah. BPBPK bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pencegahan, penanganan, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana serta kebakaran. Sebagai contoh, penelitian mengenai tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan, akses jalan, kedekatan dengan sungai, jenis tanah, dan kemiringan lereng menjadi faktor dominan penyebab kebakaran (Arifin, 2025). Pola risiko seperti ini dapat dipetakan dan diantisipasi melalui pelatihan kesiapsiagaan yang efektif bagi aparaturnya.

Lebih jauh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berwawasan lingkungan dan pemanfaatan kearifan lokal menjadi strategi penting dalam mitigasi bencana di Kalimantan Tengah. Pendekatan ini menekankan pelibatan masyarakat secara langsung dan menyesuaikan strategi mitigasi dengan nilai-nilai lokal (Multazam, 2024). Namun, di lapangan masih ditemukan kesenjangan antara tingkat kerawanan bencana dengan kesiapan aparaturnya. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah materi pelatihan yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan, frekuensi pelatihan yang rendah, metode yang terlalu teoretis, kurangnya sarana prasarana pendukung, serta minimnya evaluasi pascapelatihan. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan pegawai dalam menangani bencana secara cepat, tepat, dan terorganisir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, **kesiapsiagaan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, tindakan yang tepat guna, serta berdaya guna (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Sementara itu, **United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)** mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai kemampuan untuk merespons secara cepat dan tepat berdasarkan analisis risiko dan sistem peringatan dini yang efektif (*Definition: Preparedness, n.d.*). Kesiapsiagaan mencakup kegiatan seperti perencanaan kontingensi, pengumpulan peralatan, koordinasi kelembagaan, serta pelatihan dan simulasi di lapangan. Dengan demikian, pelatihan kesiapsiagaan bencana memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengenali tanda-tanda ancaman serta melakukan penanggulangan yang efektif (Multazam, 2024).

Dari sisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi aparaturnya menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana. Menurut Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2025, kompetensi aparaturnya meliputi kemampuan teknis, manajerial, sosial-kultural, dan

kebijakan (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Penanggulangan Bencana, 2024). Kompetensi teknis mencakup kemampuan dalam manajemen risiko bencana, penanganan darurat, evakuasi, dan manajemen logistik (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Penanggulangan Bencana, 2024). Kompetensi manajerial melibatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan keputusan (Resia, 2022). Kompetensi sosial-kultural berkaitan dengan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat multikultural (*Rangkuman Kompetensi Teknis, Manajerial, Dan Sosial Kultura Sesuai Permenpanrb No 38 Tahun 2017*, 2023), sedangkan kompetensi kebijakan menuntut kemampuan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana berbasis data dan analisis (Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Penanggulangan Bencana, 2024). Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, Malayu dalam (Wulansari et al., 2017) menjelaskan bahwa pengembangan SDM merupakan proses pembinaan dan edukasi untuk meningkatkan keahlian teknis, teoritis, konseptual, serta moral pegawai dalam melaksanakan tugas. Pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung pentingnya pelatihan dalam meningkatkan kinerja aparatur penanggulangan bencana. (Putranto, 2019) menemukan bahwa pendidikan dan pelatihan kebencanaan berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai BPBD Provinsi Sumatera Selatan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas kerja. (Sudaryanto, 2021) menyimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah belum memiliki kebijakan pelatihan pengurangan risiko bencana yang terstruktur, sehingga kompetensi ASN masih terbatas. (Mulyadi et al., 2023) menegaskan bahwa efektivitas edukasi aman bencana di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif dan evaluasi rutin.

Sementara itu, penelitian oleh (Bantul et al., 2025) menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan pegawai BPBD ($p=0,032$; $r=0,336$). (Ahiruddin et al., 2020) juga menemukan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kinerja pegawai BPBD Kota Bandar Lampung dengan nilai korelasi 0,839. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan kesiapsiagaan bencana memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah. Pelatihan yang dirancang dengan baik, berkesinambungan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur untuk merespons bencana secara cepat, tepat, dan efektif, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana dominan di Kalimantan Tengah.

METODE

Untuk memahami seberapa efektif pelatihan kebencanaan dalam meningkatkan kinerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial melalui persepsi, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Menurut (Moleong 2019), metode kualitatif dianggap naturalistik karena dilakukan tanpa intervensi dalam lingkungan alami dan berfokus pada pemahaman arti daripada angka statistik. Studi ini dilakukan di kantor BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber utama penelitian ini adalah Bapak Alpius Pamanan, S.Hut, yang bertugas sebagai Kepala Bidang, serta dua staf: Bapak Adi Dermawan Saputra dan Bapak Sugianto. Mereka dipilih secara acak karena memiliki pengalaman langsung dalam melaksanakan pelatihan kebencanaan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan anggota staf BPBPK, instruktur pelatihan, dan pejabat struktural; dan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan tahunan BPBPK, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik tentang kesiapsiagaan bencana. Model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana 2014) digunakan untuk melakukan analisis data, yang mencakup tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi berulang untuk menghasilkan hasil yang akurat. Hasil penelitian kemudian disusun dalam laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil, kesimpulan, dan saran, dengan

harapan dapat menjadi masukan bagi BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan efektivitas pelatihan kebencanaan dan kinerja aparatur di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan memberikan otonomi kepada daerah, pemerintah ingin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Otonomi ini dimaksudkan untuk memberi daerah pedoman yang jelas untuk membangun organisasi yang efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah produk hukum terbaru pemerintah tentang Organisasi dan Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu dari Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dan berfungsi sebagai lembaga teknis yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menangani masalah bencana di wilayah tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Untuk menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan urusan tersebut maka kelembagaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. BPBPK merupakan bagian dari Perangkat Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Oleh karena itu, pengelolaan bencana adalah upaya yang mencakup berbagai aspek baik sebelum (pra) bencana, pada saat (bencana), dan setelah (pasca) bencana itu sendiri, dan bukanlah tindakan yang terjadi secara kebetulan sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat bencana. Penanggulangan bencana, jika diterapkan ke dalam daur program kerja, merupakan siklus kegiatan pra bencana yang menghasilkan pengurangan resiko bencana yang terukur, penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat, dan pemulihan yang lebih tepat dan efektif.

Bagian Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan didukung oleh unsur pengarah dan pelaksana (kepala dinas). Dalam struktur kepegawaian terdapat tiga status kepegawaian yaitu: PNS, P3K, dan juga Relawan (bersifat kontrak tahunan). Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) bertanggung jawab untuk membantu gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penanggulangan bencana serta pemadam kebakaran. Untuk melakukan tugas ini, BPBPK bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, pedoman, dan pengarah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang adil, cepat, tepat, efektif. Selain itu, BPBPK menyelenggarakan penanggulangan bencana dan kebakaran, standarisasi, persyaratan, dan peta rawan bencana. Selain itu, badan tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan operasional untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dari APBD dan APBN, merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terpadu, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan bapak Alpius Patanan, S.Hut. mengungkapkan bahwa BPBD Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebijakan yang berfokus pada meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah, dalam menghadapi dan menanggulangi

bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kalimantan Tengah, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus manajemen bencana, sejalan dengan kebijakan ini. BPBD bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis dan manajerial dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah membekali aparatur agar memiliki kompetensi dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif. Kebijakan pelatihan ini juga mendukung penerapan konsep *blended learning*, yaitu kombinasi antara pelatihan tatap muka dan daring, agar dapat menjangkau aparatur di berbagai kabupaten/kota secara lebih luas dan efisien.

Berbagai jenis pelatihan ditawarkan oleh BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani situasi bencana dari sisi teknis maupun manajerial. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan), Bimbingan Teknis (Bimtek) Mitigasi Cepat, dan In House Training adalah contoh dari jenis pelatihan ini. Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) sendiri terdiri dari dua tingkatan, yaitu Diklat Dasar Manajemen Bencana (DMB) dan Diklat Lanjutan. Pelatihan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, tetapi tujuan utamanya adalah untuk membangun aparatur yang kuat, terampil, dan siap menghadapi berbagai bencana di Kalimantan Tengah. Pelatihan dalam rumah ini biasanya dilakukan secara internal di BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ditujukan untuk staf yang bekerja di bidang teknis, seperti karyawan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB). Fokus kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional aparatur untuk mengelola data kebencanaan, sistem peringatan dini, komunikasi darurat, dan koordinasi antarlembaga saat bencana terjadi. Sehingga peserta dapat memahami mekanisme kerja dalam situasi darurat, pelatihan dilakukan dengan pendekatan praktis melalui simulasi dan latihan langsung di lapangan. Selain itu, BPBD juga mengadakan Bimbingan Teknis Mitigasi Cepat secara teratur. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan aparatur untuk menghadapi bencana musiman atau mendesak. Bimbingan ini biasanya diberikan sebelum periode bencana seperti musim kemarau, yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), atau musim penghujan, yang dapat menyebabkan banjir. Pemetaan risiko cepat, penggunaan peralatan penyelamatan, dan koordinasi tanggap darurat lintas sektor adalah topik bimtek. Untuk melatih peserta dalam merespons bencana secara langsung di lapangan, pelatihan diberikan dalam bentuk workshop dan simulasi lapangan. Untuk saat ini, pelatihan dalam bentuk Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) dilakukan secara resmi dan terorganisir dengan bantuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah.

Diklat Dasar Manajemen Bencana (DMB) dan Diklat Lanjutan adalah dua tingkat pelatihan ini. Diklat dasar ditujukan untuk aparatur baru yang belum memahami manajemen kebencanaan dengan baik. Di antara materinya adalah pengenalan konsep dasar tentang penanggulangan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Untuk menjangkau peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, diklat dasar dilaksanakan menggunakan pendekatan pembelajaran campuran, yang berarti gabungan pembelajaran daring dan tatap muka. Aparatur yang telah mengikuti pelatihan dasar atau memiliki pengalaman di bidang kebencanaan dapat mengikuti Diklat Lanjutan. Pelatihan teknis dan lebih mendalam seperti JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pascabencana), pelatihan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi, dan pelatihan kaji cepat. Pelatihan khusus ini mengajarkan aparatur untuk melakukan analisis risiko, membuat skenario kontinjensi, dan menilai kerusakan, kerugian, dan kebutuhan setelah bencana. Diharapkan peserta diklat ini memiliki kemampuan yang menyeluruh dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Secara keseluruhan, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan sistem pengembangan kapasitas aparatur yang terstruktur sekaligus adaptif terhadap kebutuhan daerah melalui kombinasi pelatihan internal, bimtek, dan diklat berjenjang. Diharapkan melalui kegiatan ini, aparatur akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teori manajemen bencana dan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep ini secara praktis untuk melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak bencana yang akan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah.

*Peran Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Meningkatkan Kompetensi
Aparatur BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah*

Tujuan utama pelatihan kesiapsiagaan bencana ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan situasi setelah bencana secara cepat dan tepat. Diharapkan bahwa pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan teknis aparatur dalam membuat rencana kontinjensi, menyelidiki kebutuhan pascabencana, dan mengelola data dan informasi kebencanaan secara terintegrasi antarinstansi. Pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap tanggap terhadap risiko bencana, sehingga pemerintah tidak hanya bertindak secara reaktif ketika bencana terjadi, tetapi juga bertindak proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak negatifnya.

Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap dapat membangun aparatur yang tangguh, profesional, dan siap siaga untuk membantu mencapai visi pembangunan Kalimantan Tengah yang berketahanan terhadap bencana. Sebagian pelatihan yang diberikan oleh BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan secara kombinatif, dengan beberapa dilakukan secara rutin dan terstruktur, dan yang lainnya dilakukan secara insidental sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan ancaman bencana. BPBPK dan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah biasanya bekerja sama untuk mengadakan pelatihan tahunan, termasuk pelatihan dasar manajemen bencana (DMB), in house, bimtek mitigasi cepat, diklat, dasar manajemen bencana (DMB) JITUPASNA, dan penyusunan rencana kontinjensi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan situasional dan kondisi lapangan, hampir semua karyawan telah mengikuti pelatihan khusus atau tematik seperti pelatihan penggunaan peralatan penyelamatan di perairan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan simulasi tanggap darurat. Dengan pola pelaksanaan yang fleksibel ini, BPBPK dapat memastikan kesiapsiagaan aparatur tetap terjaga di seluruh wilayah provinsi dan menyesuaikan kegiatan pelatihan dengan kondisi faktual.

Pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diadakan oleh BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dinilai meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani bencana. Menurut narasumber utama, ada perbedaan yang cukup mencolok antara aparatur yang telah menerima pelatihan dan yang belum. Aparatur yang telah dilatih biasanya dapat membuat keputusan cepat, berkolaborasi di lapangan, dan menerapkan prosedur tanggap darurat sesuai prosedur operasional. Selain itu, mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fase-fase manajemen bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan pascabencana. Dua pegawai yang juga diwawancarai, bapak Adi Dermawan Saputra dan Sugianto, juga membuat pernyataan serupa.

Mereka mengklaim bahwa pelatihan benar-benar meningkatkan kesiapan seseorang dan kelompok di lapangan. Setelah mengikuti pelatihan, salah satu karyawan mengatakan bahwa dia sekarang lebih memahami cara berkomunikasi dan membagi tugas saat terjadi bencana, yang memungkinkan penanganan bencana yang lebih cepat dan terkoordinasi. Pegawai lainnya mengatakan bahwa pelatihan juga mengajarkan kemampuan untuk tetap tenang dan bertindak dalam situasi darurat, yang sebelumnya sulit diperoleh jika Anda tidak pernah mengalami situasi darurat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan BPBPK sangat penting dan efektif dalam membangun aparatur yang responsif, terampil, dan siap menghadapi berbagai bahaya yang mungkin terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, kantor BPBPK provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki standar untuk mengukur keberhasilan pelatihan kesiapsiagaan bencana, dan monitoring dan evaluasi masih belum dilakukan secara tertulis dan terprogram. Di BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, keterlibatan pihak eksternal sangat strategis dan luas dalam penyelenggaraan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelatihan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). Kedua lembaga tersebut berkontribusi pada pembuatan materi, penyediaan instruktur berkualitas, dan memastikan bahwa pelatihan dilakukan sesuai dengan standar nasional manajemen bencana yang ditetapkan oleh BNPB. Selain itu, secara teratur bekerja sama dengan BNPB untuk menyelaraskan kebijakan, teknik pelatihan, dan peningkatan kemampuan aparatur di daerah.

Selain pemerintah, partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelatihan. Ini terlihat pada bimtek kesiapsiagaan bencana, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang mitigasi, evakuasi, dan penanganan darurat bencana di

tempat mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan memperkuat peran masyarakat sebagai pusat penanggulangan bencana di tingkat lokal. Oleh karena itu, kolaborasi dalam pelatihan antara BPBD, lembaga pemerintah pusat, dan masyarakat merupakan langkah penting menuju sistem penanggulangan bencana yang tangguh, terpadu, dan berbasis partisipasi.

BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah telah mulai mengambil tindakan adaptif untuk meningkatkan efisiensi kegiatan pelatihan dalam kaitannya dengan rencana pengembangan dan inovasi metode pelatihan di masa mendatang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPBPK saat ini tidak hanya mengandalkan pelatihan tatap muka tetapi juga mulai memberikan pelatihan dan sharing session kepada BPBPK kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Tengah secara online. Sesi berbagi ini berfungsi sebagai forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan antara paratur, terutama tentang praktik terbaik dalam penanganan bencana di wilayah masing-masing. Kegiatan ini memungkinkan aparatur dari berbagai daerah untuk berkomunikasi tentang masalah lapangan dan cara terbaik untuk menangannya.

Sementara itu, pembinaan online sebagai pendampingan berkelanjutan memungkinkan BPBD provinsi untuk memberikan petunjuk, evaluasi, dan pembaruan materi tanpa harus menunggu pelatihan tatap muka berikutnya. Para pegawai mengatakan bahwa setiap elemen pelatihan kesiapsiagaan bencana dinilai saling melengkapi dan bermanfaat. Mereka memutuskan bahwa tidak ada komponen yang lebih penting daripada yang lain karena masing-masing memberikan pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk menangani bencana di lapangan. Misalnya, simulasi lapangan dianggap sangat bermanfaat karena peserta dapat mempraktikkan apa yang dipelajari secara langsung dan mengalami situasi nyata saat bencana terjadi. Materi teknis juga penting karena mengajarkan mereka dasar-dasar tentang evakuasi, penggunaan alat keselamatan, dan penanganan korban.

Pelatihan manajemen tim, di sisi lain, mengajarkan mereka cara bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan membuat keputusan darurat dengan cepat. BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya untuk memperluas jangkauan pelatihan serta memastikan peningkatan kapasitas aparatur berjalan secara berkelanjutan, fleksibel, dan efisien melalui inovasi pelatihan seperti sesi berbagi dan pelatihan online. Karena pelatihan mencakup bukan hanya teori tetapi juga pengalaman praktis yang dapat diterapkan di lapangan, karyawan merasa pelatihan itu lengkap.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai Peran Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pelatihan memiliki peran strategis dan penting dalam meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial aparatur dalam penanggulangan bencana. Diklat Dasar dan Lanjutan Manajemen Bencana, Bimbingan Teknis Mitigasi Cepat, dan Pelatihan In-House telah terbukti dapat meningkatkan kesiapsiagaan, keterampilan operasional, dan koordinasi antarpegawai di lapangan. Aparatur yang telah dilatih lebih baik dalam mengambil keputusan cepat, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan mengelola data dan situasi darurat. Penelitian juga menemukan bahwa belum ada sistem yang formal dan terstandar untuk menilai dan mengukur keberhasilan pelatihan. Untuk menilai efektivitas pelatihan dalam jangka panjang, monitoring dan evaluasi belum direncanakan. Selain itu, terbukti bahwa partisipasi lembaga eksternal seperti BPSDM, BNPB, dan partisipasi masyarakat meningkatkan kualitas pelatihan dengan menyediakan instruktur profesional dan pendekatan berbasis partisipasi komunitas.

Untuk membuat pelatihan lebih berkelanjutan, tepat sasaran, dan adaptif terhadap dinamika risiko bencana di Kalimantan Tengah, diperlukan penguatan dalam domain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Agar jangkauan pelatihan semakin luas, inovasi seperti pembelajaran campuran, sesi berbagi, dan pelatihan online harus terus dikembangkan. Dengan demikian, pelatihan kesiapsiagaan bencana dapat menjadi instrumen penting dalam membentuk aparatur BPBPK yang tangguh, profesional, dan berkompeten untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Tengah yang berketahanan terhadap bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahiruddin, A., Elina, M., & Hulami, J. T. (2020). Hubungan Pelatihan Dengan Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 4(4), 21–28. <https://doi.org/10.24967/jmms.v4i4.1062>
- Arifin, D. (2025). *Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Indonesia pada 27 September 2025*. Bnpb.Go.Id. <https://bnpb.go.id/berita/perkembangan-situasi-dan-penanganan-bencana-di-indonesia-pada-27-september-2025>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual. *Info Bencana*, 5(1), 1–19. [https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin Info Bencana/Buletin Info Bencana Januari 2024.pdf](https://bnpb.go.id/storage/app/media/Buletin%20Info%20Bencana/Buletin%20Info%20Bencana%20Januari%202024.pdf)
- Bantul, D. K., Fathurrahman, L., Pambudi, T. S., & Wulandari, E. T. (2025). Hubungan Antara Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi pada Pegawai Instansi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di Kabupaten Bantul. 7(2), 563–571. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i2.7646>
- BNBP. (2021). Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah 2022 - 2026. *Kedeputian Bidang Sistem Dan Strategi Direktorat Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana*, 173. [https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Jawa Tengah/Dokumen KRB Prov. Jawa Tengah_final draft.pdf](https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Jawa%20Tengah/Dokumen%20KRB%20Prov.%20Jawa%20Tengah_final%20draft.pdf)
- Definition: Preparedness*. (n.d.). United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- Multazam. (2024). *Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana*.
- Mulyadi, M., Rosadi, B., & Rumiasari, M. (2023). Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Aman Bencana (BPDB) Jawa Barat. *Jurnal Publisitas*, 10(1), 92–100. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i1.380>
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 5 (2024).
- Putranto, H. A. (2019). Peranan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kebencanaan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(1), 13–19. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.682>
- Rangkuman Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultura Sesuai Permenpanrb No 38 Tahun 2017*. (2023). Badan Kepegawaian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
- Resia, E. (2022). *Mengenal Lebih Dekat Kompetensi Manajerial*. KEMENTERIAN KEUANGAN RI.
- Sudaryanto, S. (2021). Pengurangan Resiko Bencana Alam Melalui Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Penangulangan Bencana Daerah di Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 3(1), 60–82. <https://doi.org/10.32834/jplan.v3i1.289>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 (2007).
- Wulansari, D., Darumurti, A., & Hartomi Akta Padma Eldo, D. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manjemen Bencana. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4383>